| JELANG IMPLEMENTASI B40 |

KEJAR TAYANG TEBAS RINTANGAN

Tepat 1 Januari 2025, pemerintah akan mengimplementasikan program penggunaan bahan bakar minyak biodiesel B40. Program ini digadang menguatkan ketahanan energi dan memangkas ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Akan tetapi, ada beberapa problem yang masih perlu diurai lebih detail.

Anitana W. Puspa, Aziz Rahardyan, & Tegar Arief
redaksi@bisnis.com

BISNIS Fokus

B40 merupakan bahan bakar minyak (BBM) campuran solar sebanyak 60% dan bahan bakar nabati (BBN) dari kelapa sawit sebanyak 40%. Implementasi B40 pun diklaim memiliki beberapa manfaat.

Di antaranya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menyelamatkan devisa negara, mendukung industri kelapa sawit, mendorong perekonomian masyarakat perdesaan, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), membuka peluang lapangan kerja baru, serta mendukung komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris.

Beragam persiapan pun dilakukan untuk memastikan program B40 berjalan lancar pada tahun depan. Ancang-ancang peningkatan produksi biosolar yang mengandung 40% biodiesel mulai dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan.

Sebab, peningkatan kadar biodiesel dalam biosolar dari 35% menjadi 40% mulai tahun depan mensyaratkan tambahan produksi BBN di dalam negeri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun memproyeksi kebutuhan biodiesel pada 2025 bakal mencapai 15,62 juta kiloliter, meningkat jika dibandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan sebanyak 13,4 juta kiloliter.

Pemerintah dan pihak terkait pun telah mantap untuk mengeksekusi program tersebut. Namun, menurut beberapa narasumber yang dihubungi *Bisnis*, ada beberapa problematika yang patut dicermati dan dicarikan solusi.

Pertama, kemampuan masyarakat menyerap produksi B40 pada tahun depan. Selain itu, kapasitas produksi B40 pada tahun depan juga menjadi tantangan.

Artinya, pemerintah harus menyiapkan teknologi, manufaktur, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk mengejar produksi B40 yang ditaksir mencapai 15,62 juta kiloliter.

Kedua, pasokan bahan baku yakni minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO). Sebab hal yang amat dikhawatirkan adalah berkurangnya pasokan CPO untuk bahan baku produk turunan terutama minyak goreng, sehingga jika tidak diantisipasi maka akan menyebabkan kelangkaan komoditas pangan strategis itu.

Ketiga, soal pembiayaan yang butuh perhatian cukup dominan mengingat terbatasnya anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Bisnis mencatat, anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan biodiesel B40 pada tahun depan diestimasi senilai Rp47 triliun, yang semuanya bersumber dari BPDPKS.

Dalam kaitan ini, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, menjamin implementasi B40 berjalan sesuai rencana.

Dia menjelaskan, sejak Juni—Oktober 2024, Kementerian ESDM telah menginformasikan bahwa persiapan menjelang kebijakan bersifat mandatori ini telah matang dan dukungan dari badan usaha pun cukup maksimal.

"Sudah ada kajiannya, baik dari BPDPKS maupun dari internasional. Produksi dan distribusi serta infrastruktur juga disediakan oleh badan usaha," katanya.

Dia menambahkan, untuk saat ini produksi B40 sudah dapat dilakukan dan beberapa perusahaan telah memiliki fasilitas produksi yang sesuai dengan sesifikasi bahan bakar jenis itu.

Seirama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera, pemerintah terus mematangkan persiapan implementasi B40, khususnya dari sisi infrastruktur serta sarana dan prasarana.

PEMBIAYAAN

Selain itu, saat ini pemangku kebijakan juga tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang menjadi isu krusial lantaran terbatasnya dana yang dikelola oleh BPDPKS.

"Soal itu secara teknis masih dikaji oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.

Berdasarkan kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan asumsi penyaluran B40 mencapai 16,08 juta kiloliter maka pembiayaan yang dibutuhkan senilai Rp37,5 triliun pada tahun depan.

Sementara itu, mengacu pada penghitungan BPDPKS, dengan asumsi kebutuhan biodiesel sebanyak 16 juta kiloliter maka implementasi B40 membutuhkan dana senilai Rp46 triliun—Rp47 triliun.

Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, mengatakan bahwa pemerintah masih perlu merumuskan inovasi pembiayaan program mandatori biodiesel B40, kendati dana kelolaan BPDPKS yang ada saat ini masih mencukupi.

Achmad menjelaskan, posisi keuangan BPDPKS pada pengujung tahun ini diperkirakan berada pada kisaran Rp31 triliun—Rp32 triliun.

Kemudian, berpijak pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan, potensi tambahan penerimaan pada tahun depan sekitar Rp20,3 triliun, serta dana pengelolaan Rp1,1 triliun.

Dengan demikian, keuangan BPDPKS masih cukup mampu untuk membiayai implementasi B40. Namun menurutnya, pemerintah juga perlu menyusun skema pembiayaan alternatif sebagai mitigasi risiko jangka panjang.

"Kalau asumsi harga *Fatty Acid Methyl Ester* [FAME] lebih mahal dibandingkan dengan solar yang asumsinya tetap, maka kebutuhan pendanaan B40 bisa mencapai Rp46 triliun," ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, memaparkan tantangan implementasi B40 masih berkaitan dengan produksi minyak sawit sehingga pasokan untuk program tersebut harus diamankan.

Selain itu, dengan makin besarnya kandungan BBN maka besaran subsidi yang harus diberikan oleh BPDPKS turut membengkak.

Persoalannya, sumber dana BPDPKS amat bergantung pada harga dan nilai ekspor CPO. Makin tinggi ekspor, makin tinggi pula dana yang diperoleh. Pun sebaliknya.

Sejauh ini, dia memproyeksikan harga CPO tidak melonjak signifikan pada tahun depan lantaran kondisi ekonomi di banyak negara yang sedang tidak baik-baik saja.

"Ini yang harus diantisipasi, jangan sampai ujung-ujungnya, ketika program B40 berjalan lalu kemudian pajak ekspor kita tidak mencukupi untuk memberikan subsidi dan pemerintah *nombok*," ujarnya.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, memandang sepintas memang tidak ada kendala teknis yang signifikan dalam memasarkan B40 kepada masyarakat.

Dia meyakini hal tersebut dapat dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dengan menambah pompa yang sudah ada atau dengan meng-*upgrade* pompa eksis.

Namun, pemerintah juga patut menyiapkan strategi agar harga jual B40 di level konsumen lebih terjangkau sehingga bahan bakar tersebut dapat diterima di pasar dengan optimal.

INVESTOR

Di sisi lain, dalam rangka menjamin efektivitas program ini, menurutnya pemerintah perlu mencari investor yang mampu melakukan konversi hingga mencapai B100 yang pada akhirnya memberikan berdampak signifikan pada perekonomian dan lingkungan.

"Untuk mencapai itu kita tidak punya teknologi. Jadi pemerintah harus mencari investor yang bisa mengolah bahkan hingga B100 dalam pengurangan karbon," ujarnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, mengatakan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam realisasi kebijakan B40.

Menurutnya perseroan sudah siap dengan program penugasan ini. Terlebih Pertamina sebelumnya telah berhasil mengimplementasikan program B35.

Akan tetapi, perseroan masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah terkait dengan implementasi kebijakan B40 sehingga memiliki legalitas yang kuat untuk melakukan operasional produksi.

"Kami masih menunggu regulasi dari pemerintah, paralel kilang disiapkan. Penugasan ya harus siap karena sekarang sudah B35," ujarnya.

Sekadar informasi, Pertamina telah mempersiapkan kilang untuk memproduksi B40. Meski demikian, Fadjar belum bisa memerinci berapa kapasitas produksi biosolar dari kilang Pertamina.

Dia hanya mengatakan pihaknya masih memiliki waktu sekitar enam bulan untuk memasarkan B40.

Sementara itu, kalangan pelaku usaha merespons positif implementasi B40. Hanya saja, kelompok pebisnis mengingatkan agar pemerintah menyusun peta jalan agar tidak melahirkan efek samping bagi sektor lain, utamanya ekspor dan pangan.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan orientasi program B40 dan eskalasi menuju B50 hingga B100 menjadi program jangka panjang yang menguntungkan untuk ekonomi domestik.

Dari sisi neraca perdagangan, sektor minyak dan gas (migas) menyumbang defisit yang signifikan. Menurutnya, dengan B40 sebagai substitusi migas, akan memperbaiki neraca dan cadangan devisa.

Selain itu, komditas ini akan mendorong rasio energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan ekonomi hijau. Sehingga layak untuk terus didorong dan menjadi program prioritas.

Adapun, dari sisi produksi kelapa sawit yang menjadi inti dan sumber energi ini, perlu dilakukan peningkatan produktivitas sehingga tidak membuat konstraksi untuk produk turunan lain.

"Pemerintah perlu membuat peta jalan jangka panjang, *hilirisasi* sawit baik untuk energi, pangan maupun produk olahan lain dengan nilai tambah maksimal," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan B40 menjadi solusi penyerapan CPO di tengah prospek suram pasar global pada tahun depan.

Terlebih, proyeksi ekonomi China dan India yang menjadi dua pasar ekspor CPO utama cukup tertekan pada tahun depan. "Dalam kondisi ini maka perlu ada upaya menyerap pasokan CPO, termasuk dengan B40," katanya. ■

> **Kami masih menunggu regulasi dari pemerintah, paralel kilang disiapkan.**

Data Volume Distribusi Biodiesel di Indonesia pada Januari - Oktober 2024

Save & Share

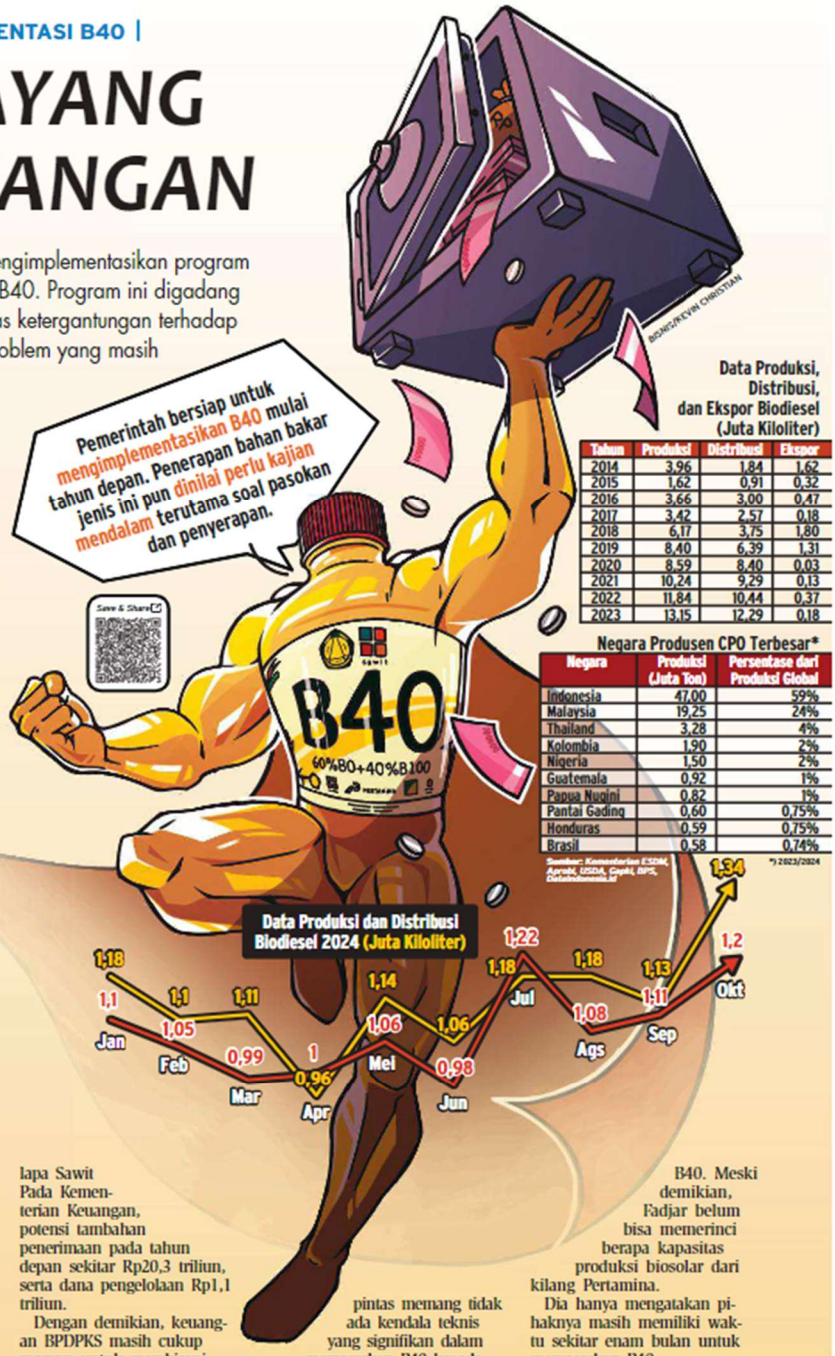

BISNIS/KEVIN CHRISTIAN

Data Produksi, Distribusi, dan Ekspor Biodiesel (Juta Kiloliter)

Tahun	Produksi	Distribusi	Ekspor
2014	3,96	1,84	1,62
2015	1,62	0,91	0,32
2016	3,66	3,00	0,47
2017	3,42	2,57	0,18
2018	6,17	3,75	1,80
2019	8,40	6,39	1,31
2020	8,59	8,40	0,03
2021	10,24	9,29	0,13
2022	11,84	10,44	0,37
2023	13,15	12,29	0,18

Negara Produsen CPO Terbesar*

Negara	Produksi (Juta Ton)	Persentase dari Produksi Global
Indonesia	47,00	59%
Malaysia	19,25	24%
Thailand	3,28	4%
Kolombia	1,90	2%
Nigeria	1,50	2%
Guatemala	0,92	1%
Papua Nugini	0,82	1%
Pantai Gading	0,60	0,75%
Honduras	0,59	0,75%
Brasil	0,58	0,74%

Sumber: Kementerian ESDM, Aprobi, USDA, Gapki, BPS, Databoxindonesia.id

*) 2023/2024